

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Jambi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan merujuk pada teori *Collaborative Planning* oleh Innes & Booher (2010), yang mencakup lima indikator utama sebagai dasar analisis, yaitu: partisipasi pemangku kepentingan, dialog terbuka, setting persetujuan dan komitmen, implementasi dan pencapaian hasil, serta evaluasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Collaborative Planning* oleh Pemerintah Kota Jambi dalam upaya menurunkan angka pengangguran telah dilakukan, namun belum berjalan secara efektif. Proses kolaborasi masih bersifat terbatas, karena hanya melibatkan instansi pemerintah tanpa partisipasi aktif dari pihak swasta atau pemangku kepentingan lainnya dalam proses dialog, penetapan kesepakatan, dan komitmen bersama. Ketidakterlibatan sektor non-pemerintah ini menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan implementasi program-program ketenagakerjaan belum optimal dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kota Jambi. Selain itu, komunikasi antar lembaga yang kurang intensif serta belum terjalinnya sinergi yang solid dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga turut memperlemah efektivitas kolaborasi yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas

sektor dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar *Collaborative Planning* dapat berjalan lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Planning* dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Jambi, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat forum kolaboratif lintas sektor, yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintahan saja, tetapi juga pihak swasta dan dunia usaha, melalui mekanisme dialog terbuka secara berkala agar seluruh pihak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan tenaga kerja, serta masukan terhadap program yang berjalan. Selain itu, dibutuhkan pengaturan komitmen antar stakeholder, termasuk pihak swasta melalui tanda tangan nota kesepahaman dan rencana aksi bersama sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kolektif dalam mengatasi masalah pengangguran.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akses terhadap data ketenagakerjaan yang akurat dan terkini guna mendukung perumusan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Langkah strategis lainnya adalah optimalisasi program pelatihan kerja yang berbasis pada kebutuhan industri, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti ekonomi kreatif dan digitalisasi. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi

juga diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan berbasis kompetensi dengan menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia industri, serta memperluas akses informasi lowongan kerja kepada masyarakat, agar program yang diatasi dalam mengatasi pengangguran dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah juga disarankan dapat meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Salah satunya, dengan pengembangan platform digital ketenagakerjaan yang dapat memfasilitasi pencocokan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap proses pengambilan keputusan internal dan dinamika antar instansi dalam struktur birokrasi pemerintah daerah. Peneliti juga dapat memperluas wilayah penelitian ke kota atau kabupaten lain sebagai perbandingan guna melihat perbedaan pola *collaborative planning* di berbagai daerah. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif, terutama dalam mengukur efektivitas program dan persepsi stakeholder terhadap perencanaan kolaboratif. Penelitian mendatang juga dapat meneliti peran teknologi informasi dalam memperkuat kolaborasi antar instansi, serta mengkaji lebih

dalam faktor penghambat partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam forum perencanaan kebijakan publik.